

Panji Adam, S.Sy., M.H.



# FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH

KONSEP, METODOLOGI DAN IMPLIMENSINYA  
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



A5.04.225  
**FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH**

Penulis:  
Panji Adam, S.Sy., M.H.  
Editor:  
Tarmizi dan Muhammad Akbar

Diterbitkan oleh AMZAH  
Jl. Sawo Raya No. 18  
Jakarta 13220  
Imprint Bumi Aksara  
site: [www.bumiaksara.com](http://www.bumiaksara.com)  
[www.bumiaksaraonline.com](http://www.bumiaksaraonline.com)  
e-mail: [editorial@bumiaksara.com](mailto:editorial@bumiaksara.com)  
[marketing@bumiaksara.com](mailto:marketing@bumiaksara.com)  
Anggota IKAPI



Cetakan pertama, Desember 2017  
Design Cover, Risqiani Nur Badria  
Layouter, Pawit Suhardi  
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 978-602-0875-38-5

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

---

Tarmizi

Fatwa-fatwa ekonomi syariah / Panji Adam; editor, Tarmizi;  
-- Ed. 1, Cet. 1. -- Jakarta : Amzah, 2017.  
xvi + 396 hlm. ; 23 cm.

ISBN 978-602-0875-38-5

1. Ekonomi. I. Judul. II. Tarmizi.

## KATA PENGANTAR

*Bismillâhirrahmânirrahîm*

*Alhamdulillâh*, puji serta syukur hanyalah milik Allah yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini serta Zat menggenggam hati dan membolak-balikkan hati setiap hamba-hamba-Nya. Atas rahmat, izin, dan karunia-Nya, buku "Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah" dapat terselesaikan dengan berbagai keterbatasan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad ﷺ; dan semoga kesejahteraan dan keselamatan pula terlimpahkan kepada keluarga, para sahabatnya, dan semua umatnya yang setia dan cinta kepadanya hingga akhir zaman.

Buku ini merupakan buku ajar pada mata kuliah Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA). Pada buku ini, di awal bab, penulis memaparkan konsep mengenai konsep dasar ekonomi syariah serta dilanjutkan secara panjang lebar membahas mengenai konsep fatwa dalam sistem hukum Islam. Selain itu, sesuai dengan amanah Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah wajib beroperasi sesuai dengan Prinsip Syariah yang mana pengertian Prinsip Syariah dalam undang-undang tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam konteks ini, lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di

bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, di dalam pembahasan buku ini pula dipaparkan secara khusus bab mengenai Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Lembaga Fatwa di Indonesia serta bab mengenai profil Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, dalam buku ini dibahas pula mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengingat DPS merupakan tangan kanan dari DSN-MUI; dan pembahasan berikutnya dipaparkan mengenai lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam buku ini pula dilampirkan sebagian Fatwa-Fatwa DSN-MUI terkait dengan akad-akad yang digunakan di Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam buku ini, penulis tidak melakukan analisis terkait fatwa-fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI; karena dengan berbagai pertimbangan dan terlebih uraian dan analisis terhadap Fatwa DSN-MUI terkait ekonomi syariah banyak dilakukan dalam bentuk penelitian, baik penelitian tingkat Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), bahkan tingkat Strata 3 (S3).

Dengan telah terselesaikannya penyusunan buku ini, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Guru penulis Prof. Dr. H. M. Abdurrahman, M.A. (Guru Besar Fakultas Syariah UNISBA serta Ketua MUI Pusat) yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar senantiasa berkarya dan berkontribusi kepada masyarakat.
2. Guru penulis di bidang Hukum Perbankan Syariah, Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum serta Ketua Prodi Doktor (S3) Program Pascasarjana UNISBA) yang karena jasa beliaulah mengajarkan penulis untuk pertama kali berkarya aktif untuk melakukan kegiatan tulis-menulis dan banyak memberikan ilmunya terkait Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Dekan Fakultas Syariah, M. Roji Iskandar, Drs, M.H. yang telah mendukung penulis berkiprah di Fakultas Syariah.
4. Rekan-rekan di Fakultas Syariah UNISBA, khususnya rekan-rekan dosen di Prodi Muamalah yang banyak memberikan kontribusi pemikiran serta berjuang bersama demi kemajuan Fakultas Syariah, khususnya Prodi Muamalah.

5. Kedua orangtua penulis (Bapak Agus Rohendi (Aro) dan Ibu Nani Ukawati) yang senantiasa berjuang demi putra-putranya serta tidak henti-hentinya selalu mendoakan penulis demi kesuksesan putra-putranya.
6. Annia Eka Rahayu, yang telah sabar membantu dalam mengedit naskah buku ini hingga naskah buku ini terselesaikan.
7. Penerbit Amzah yang telah bersedia untuk menerbitkan naskah buku ini.
8. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah ﷺ menerima dan membalas segala amal ibadah bapak/ibu/saudara, serta karya ini menjadi amal jariyah yang tidak terputus amalnya hingga hari kiamat kelak serta buku ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam peribahasa dikatakan “Tak ada gading yang tak retak”. Dalam karya ini banyak sekali kekurangan serta kekeliruan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap adanya kritik, kontribusi, serta masukan yang konstruktif demi perbaikan karya ini.

Penulis

Panji Adam

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
BAB 1 KONSEP EKONOMI SYARIAH.....	1
A. Definisi Ekonomi Syariah.....	1
B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....	8
C. Tujuan, Filosofi, dan Metodologi Ekonomi Syariah .....	9
D. Sumber Hukum Ekonomi Syariah .....	12
E. Posisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam .....	16
BAB 2 KONSEP FATWA DALAM LITERATUR USHUL FIQH.....	19
A. Makna, Kedudukan, dan Peran Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam.....	19
B. Faktor-Faktor Perubahan Fatwa .....	51
BAB 3 METODE IJTIHÂD DALAM PENETAPAN FATWA .....	74
A. Memilih Ijtihad yang Relevan.....	74
B. Hilah sebagai Argumen Penetapan Fatwa .....	102

<b>BAB 4 KAIDAH ISTINBÂTH DALAM BERFATWA .....</b>	<b>112</b>
A. Metode <i>Bayâñî</i> (Analisis Kebahasaan) .....	112
B. Metode <i>Ta'lîlî</i> .....	115
C. Metode <i>Istishlâhî</i> .....	116
<b>BAB 5 KAIDAH-KAIDAH FIQH MUAMALAH DALAM PENETAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL- MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) .....</b>	<b>118</b>
A. Definisi <i>Qawâid Fiqhiyyah</i> (Kaidah-Kaidah Fiqh).....	118
B. Selayang Pandang Sejarah <i>Qawâ'id Fiqhiyyah</i> .....	126
C. Kegunaan Kaidah Fiqh .....	129
D. Macam-Macam Kaidah dan Tingkatannya .....	130
E. Objek Penerapan Kaidah Fiqh.....	132
F. Proses Pembentukan Kaidah Fiqh .....	134
G. Kehujahan Kaidah Fiqh .....	135
H. Faktor-Faktor Pendorong Penyusunan <i>Qawâ'id Fiqhiyyah</i> ....	138
<b>BAB 6 MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SEBAGAI LEMBAGA FATWA DI INDONESIA .....</b>	<b>140</b>
A. Majelis Ulama Indonesia.....	140
B. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	143
<b>BAB 7 PROFIL DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) .....</b>	<b>160</b>
A. Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DNS-MUI) .....	160
B. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) .....	163

C. Misi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) .....	164
D. Kedudukan, Status, dan Keanggotaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) .....	165
E. Wewenang Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) .....	165
F. Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) .....	166
G. Hubungan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Komite Perbankan Syariah.....	169
H. Peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Komite Perbankan Syariah (KPS) dalam Pembentukan Peraturan Bank Indonesia .....	173
I. Kedudukan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai Lembaga Fatwa Ekonomi Syariah .....	177
J. Sistem Kerja dan Strategi Sosialisasi Dewan Syariah Nasional .....	180

## **BAB 8 PROSEDUR DAN METODE PENETAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) .....** 189

A. Metode Penetapan Fatwa dan Prosedur Pemberian Fatwa .....	189
B. Urgensi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) .....	195
C. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bagi Praktik Perbankan .....	202
D. Kaidah dan Prinsip Penetapan Fatwa DSN-MUI.....	207

E. Fatwa sebagai Alat Pengembangan Produk Keuangan Syariah.....	209
<b>BAB 9 PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH.....</b>	<b>212</b>
A. Definisi Dewan Pengawas Syariah .....	212
B. Landasan Yuridis Pembentukan Dewan Pengawas Syariah.....	212
C. Persyaratan dalam Kualifikasi bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	214
D. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	216
E. Fungsi, Struktur, dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	217
F. Prosedur Penunjukan/Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	219
G. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	220
H. Independensi Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) ....	221
<b>BAB 10 KONSEP PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>224</b>
A. Definisi Operasional Seputar Bank dan Perbankan .....	224
B. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.....	227
C. Visi dan Misi Perbankan Syariah .....	230
D. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan Syariah .....	230
E. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia.....	232
F. Landasan Yuridis Produk-Produk Perbankan Syariah.....	234
<b>BAB 11 KONSEP ASURANSI SYARIAH.....</b>	<b>241</b>
A. Konsep Hukum Asuransi .....	241
B. Konsep Asuransi Syariah .....	251

<b>BAB 12 KONSEP PEGADAIAN SYARIAH .....</b>	<b>275</b>
A. Gadai dalam Perspektif Fiqh .....	275
B. Konsep Pegadaian Syariah .....	284
<b>BAB 13 KONSEP PASAR MODAL SYARIAH.....</b>	<b>291</b>
A. Pengertian Pasar Modal Syariah .....	291
B. Fungsi Pasar Modal Syariah .....	293
C. Peran Pasar Modal .....	294
D. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah .....	294
<b>BAB 14 SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) .....</b>	<b>296</b>
A. Definisi SBSN.....	296
B. Tujuan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) .....	298
C. Bentuk dan Jenis SBSN .....	301
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>307</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>309</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 .....	323
Lampiran 2 .....	330
Lampiran 3 .....	335
Lampiran 4 .....	341
Lampiran 5 .....	346
Lampiran 6 .....	349
Lampiran 7 .....	355

Lampiran 8 .....	360
Lampiran 9 .....	363
Lampiran 10 .....	368
Lampiran 11 .....	377
Lampiran 12 .....	388
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>395</b>

# PEDOMAN TRANSLITERASI

## A. Konsonan

- |                  |                   |                  |
|------------------|-------------------|------------------|
| 1. <b>ا</b> = a  | 11. <b>ج</b> = z  | 21. <b>ق</b> = q |
| 2. <b>ب</b> = b  | 12. <b>س</b> = s  | 22. <b>ك</b> = k |
| 3. <b>ت</b> = t  | 13. <b>ش</b> = sy | 23. <b>ل</b> = l |
| 4. <b>ث</b> = ts | 14. <b>ص</b> = sh | 24. <b>م</b> = m |
| 5. <b>ج</b> = j  | 15. <b>ض</b> = dh | 25. <b>ن</b> = n |
| 6. <b>ح</b> = h  | 16. <b>ط</b> = th | 26. <b>و</b> = w |
| 7. <b>خ</b> = kh | 17. <b>ظ</b> = zh | 27. <b>ه</b> = h |
| 8. <b>د</b> = d  | 18. <b>ع</b> = ‘  | 28. <b>ء</b> = ’ |
| 9. <b>ذ</b> = dz | 19. <b>غ</b> = gh | 29. <b>ي</b> = y |
| 10. <b>ر</b> = r | 20. <b>ف</b> = f  |                  |

## B. Vokal Pendek

1. **ا** = a
2. **ي** = i
3. **و** = u

### C. Tanda Vokal Rangkap

1.  $\ddot{\imath}$  = ai

2.  $\ddot{\omega}$  = au

### D. Tanda Vokal Panjang (Bunyi *Madd*)

1.  $\mathfrak{T}$  = â

2.  $\dot{\mathfrak{y}}$  = î

3.  $\dot{\mathfrak{f}}$  = û

# BAB 1

## KONSEP EKONOMI SYARIAH

### A. DEFINISI EKONOMI SYARIAH

Secara umum kita dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.<sup>1</sup>

Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti kata materiil, sedangkan dalam arti kata formal hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh dilakukan, yang dilarang, dan dianjurkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan atau kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat tempat hukum diciptakan.

Abdul Manan menjelaskan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur

---

1 Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2015, hlm. 51.